

Judul : PKS Dorong Interpelasi Hambalang
Tanggal : Senin, 19 November 2012
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

PKS Dorong Interpelasi Hambalang

JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong penggunaan hak interpelasi terkait kasus Hambalang. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Rohmani, mengatakan, wacana penggunaan hak interpelasi semakin menguat setelah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengeluarkan rekomendasi penggunaan hak interpelasi terkait Hambalang.

"Ini sekarang ada momentum lagi, padahal sejak awal kami usulkan interpelasi ini di internal Komisi X DPR. Namun, sedikit yang merespons," kata Rohmani di Jakarta, Ahad (18/11).

Dengan keluarnya rekomendasi BAKN itu, kata Rohmani, dia semakin yakin bahwa skandal Hambalang harus diselesaikan secara politik dan hukum. Secara politik,

pengeluaran anggaran Hambalang dinilainya berada luar tata kelola keuangan negara. Secara hukum, Rohmani menegaskan, sudah menjadi tugas KPK agar membuka kasus itu secara terang-benderang.

Menurut dia, rekomendasi BAKN tentang interpelasi Hambalang merupakan keputusan semua fraksi di DPR. Alasannya, BAKN DPR adalah representasi semua fraksi di DPR. Dengan demikian, keputusan BAKN bukan merupakan keputusan sepihak oleh fraksi tertentu di DPR.

Kepada pimpinan DPR, Rohmani berharap, mereka segera tanggap terhadap dorongan dari Komisi X DPR selaku mitra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan rekomendasi BAKN.

Ia mengatakan, komponen Ko-

misi X dan rekomendasi BAKN sudah cukup alasan untuk menggunakan hak interpelasi terkait proyek Hambalang. Pekan depan, kata dia, DPR sudah memulai masa persidangan setelah reses. Rohmani pun menegaskan, PKS akan menggulirkan penggunaan hak interpelasi.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, tidak sependapat dengan Rohmani. Menurut Tjahjo, seyogianya DPR lebih memfokuskan kepada pengawasan kinerja KPK daripada mengusulkan perlu atau tidaknya interpelasi soal kasus Hambalang.

Tjahjo yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan itu pun mengajak semua pihak untuk memercayakan penanganan kasus Hambalang kepada KPK. ■ antara ed: eh ismail